

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dalam suatu periode waktu tertentu. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika aktivitas ekonominya meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, maka pembangunan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk pemerataan pendapatan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, umumnya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap daerah biasanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi (Ramadhan, 2019).

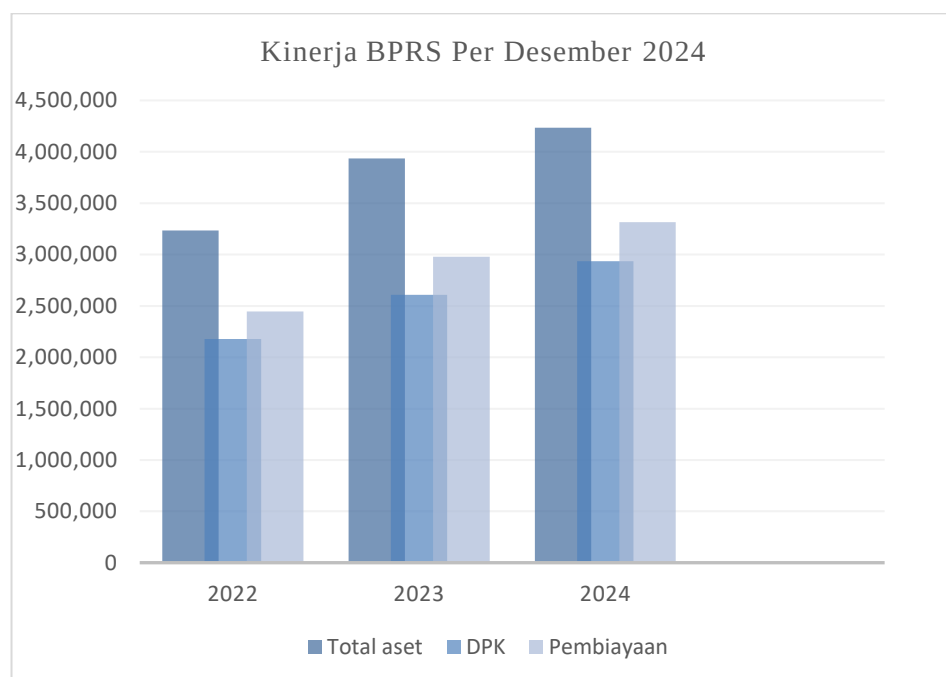
Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dari peran lembaga keuangan dan pelaku usaha lokal dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan kapasitas kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur utama dalam menilai kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Menurut (Novianti & Ishak,

2022) PAD mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik dari sumber internal seperti pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah. Fokus fiskal ini dilakukan agar daerah tidak bergantung pada transfer pusat, seraya meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jawa Tengah dalam beberapa tiga tahun terakhir menunjukkan kontribusi signifikan dari sektor-sektor yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam mendorong PAD melalui pajak dan retribusi daerah, peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian oleh (Rohmatul, 2017) menunjukkan bahwa relisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), omzet UMKM, jumlah tenaga kerja, dan jumlah UMKM secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap sektor industri pengolahan pada PDRB di Jawa Tengah. Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, mereka sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan formal. Keterbatasan agunan, kurangnya kelayakan kredit, dan minimnya literasi keuangan menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan sektor mikro dan kecil dengan prinsip syariah. Hal ini didukung oleh (OJK, 2019) Pembiayaan yang di salurkan BPRS kepada sektor UMKM menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp 8.25M, pada tahun 2022, Rp 9.77M, pada tahun 2023, dan mencapai Rp 11.10M pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peran strategis BPRS

dalam memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional. Dan berperan membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perdagangan, baik untuk menghasilkan barang dan jasa maupun memenuhi kebutuhan konsumsi (Hatsari et al., 2014).

Perkembangan BPRS di Jawa Tengah juga tergolong baik, ditunjukkan oleh aset, pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF yang cukup bagus dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa, Fakta ini menunjukkan bahwa BPRS memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui Pembiayaan dan DPK (Hidayah et al., 2020). Hal ini didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:



Grafik 1. 1 Kinerja BPRS Per desember 2024

Sumber: (OJK, 2019)

Berdasarkan grafik "Kinerja BPRS Per Desember 2024", terlihat bahwa seluruh indikator keuangan yaitu total aset, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Total aset mengalami kenaikan signifikan dari sekitar 3,2 juta pada tahun 2022 menjadi mendekati 4,2 juta pada tahun 2024. DPK juga menunjukkan tren positif, meningkat dari sekitar 2 juta pada tahun 2022 menjadi sekitar 2,6 juta pada tahun 2024. Begitu pula dengan pembiayaan yang tumbuh dari sekitar 2,4 juta menjadi sekitar 3 juta dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja BPRS yang semakin baik dalam mengelola aset, menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dengan melihat besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta pentingnya dukungan pembiayaan bagi keberlanjutan usaha mereka, maka peran lembaga keuangan seperti BPRS menjadi sangat vital. BPRS tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan berbasis syariah, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi lokal yang dapat menyalurkan dana secara lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BPRS memperoleh sumber dana yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, khususnya kepada pelaku UMKM. Mekanisme ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat lokal dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara tidak langsung, baik melalui

peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, maupun penguatan basis ekonomi kerakyatan (Purnama et al., 2024). Namun, pengaruh Pembiayaan dan DPK terhadap PAD tidak bisa dilihat secara linier. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi hubungan tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024). Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024) TPT di Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang berfluktuasi seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan regional, dibawah ini merupakan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut:



grafik 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: (statistik, 2024)

Berdasarkan Gambar 1. 2 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 sampai 2024 mengalami tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, proporsi TPT mencapai 23%, yang merupakan angka tertinggi

dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pada sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tahun 2021, TPT menurun menjadi 21%, dan terus berkurang menjadi 20% pada tahun 2022, 19% pada tahun 2023, hingga mencapai angka terendah sebesar 17% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk bekerja selama periode 2022 sampai 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk bekerja mencapai 17,05 juta jiwa, meningkat menjadi 17,32 juta jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 17,58 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, serta industri pengolahan yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Dengan demikian, grafik tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pascapandemi serta program pemerintah dalam meningkatkan lapangan pekerjaan mulai menunjukkan hasil yang positif. Tingkat Pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif dalam perekonomian daerah antara lain menurunkan daya beli masyarakat, kurangnya konsumsi agregat, serta mengurangi penerimaan pajak daerah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti peran Pembiayaan dan DPK terhadap pendapatan daerah, sebagian besar belum memperhitungkan pengaruh variabel eksternal seperti pengangguran secara eksplisit. Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik meneliti pengaruh Pembiayaan dan DPK BPRS serta Tingkat pengangguran Terbuka terhadap peningkatan pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan dan DPK pada BPRS serta Tingkat pengangguran Terbuka terhadap peningkatan pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

“Pengaruh Pembiayaan dan DPK BPRS serta Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pembiayaan BPRS berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah?
- 2) Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BPRS berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah?

- 3) Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah?
- 4) Apakah Pembiayaan, DPK, Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Pada BPRS terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada BPRS terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan, DPK, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi Latar Belakang Masalah, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan cakupan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada dua variabel bebas. Yaitu Pembiayaan, DPK, Tingkat Pengangguran Terbuka yang dianalisis pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah dan tidak mencakup lain diluar Pembiayaan dan DPK.

E. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan daerah dan keuangan syariah. Dengan menggabungkan variabel pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penelitian ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Peningkatan Pendapatan daerah serta relevansi fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah dalam konteks fiskal daerah.

2. Praktis

a) Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan dan pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah

b) Bagi akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian tambahan bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang Ekonomi Daerah, Perbankan Syariah, dan Keuangan Publik. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur ilmiah yang membahas keterkaitan antara aktivitas Pembiayaan Syariah dengan Pembangunan ekonomi Lokal.